

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

**Pertama**, Tulisan analisis bibliometrik yang dilakukan oleh (Khatib et al., 2021) mengenai cash holdings memberikan wawasan penting tentang perkembangan penelitian dalam manajemen keuangan perusahaan dan relevansinya terhadap peningkatan ekonomi. Temuan mereka menyoroti pentingnya evaluasi sistematis untuk memahami praktik keuangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang relevan jika diterapkan dalam konteks digitalisasi desa. Dalam penelitian program SIPPINTAR, pendekatan serupa dapat digunakan untuk menilai literatur tentang digitalisasi pedesaan, mengidentifikasi tren, serta kesenjangan yang ada. Selain itu, fokus artikel pada hubungan antara cash holdings, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan paralel dengan isu tata kelola lokal dan partisipasi masyarakat dalam konteks digitalisasi desa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program SIPPINTAR perlu memperhatikan tidak hanya dampak ekonominya, tetapi juga pengaruhnya pada struktur tata kelola desa dan keterlibatan masyarakat.

**Kedua**, Penelitian (Brunetti et al., 2020b) tentang transformasi digital di wilayah Tyrol-Veneto memiliki kesamaan dengan studi SIPPINTAR di Desa Wates dalam mengeksplorasi strategi pengembangan regional yang terintegrasi. Dengan pendekatan multi-pemangku kepentingan yang melibatkan perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah, penelitian tersebut menekankan pentingnya strategi yang mencakup budaya, keterampilan, infrastruktur, dan pengembangan ekosistem. Hal ini sejalan dengan fokus SIPPINTAR pada pemberdayaan ekonomi lokal, yang menunjukkan bahwa transformasi berkelanjutan membutuhkan intervensi strategis dan terkoordinasi dari berbagai sektor masyarakat.

**Ketiga**, Penelitian (Bernabe et al., 2020b) tentang kondisi kesehatan gigi dan mulut memiliki kesamaan dengan studi SIPPINTAR di Desa Wates dalam hal pendekatan analisis sistematis untuk menyelesaikan masalah sosial. Penelitian GBD menunjukkan bahwa kondisi kesehatan gigi sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi, yang mirip dengan bagaimana program SIPPINTAR

menghadapi tantangan pemberdayaan ekonomi di desa. Meskipun berbeda fokus kesehatan gigi versus pemberdayaan ekonomi, keduanya menekankan pentingnya intervensi terstruktur, penggunaan data yang komprehensif, dan pendekatan sistematis. Strategi berbasis bukti ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi setempat.

**Keempat**, (Ayu Purnamawati et al., 2023b) meneliti tentang penguatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan ekonomi desa berkelanjutan memiliki kesamaan dengan evaluasi program SIPPINTAR, yaitu fokus pada pengembangan ekonomi pedesaan. Penelitian Purnamawati menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan hijau (green growth) dan digitalisasi dengan CSR sebagai variabel moderasi, sedangkan SIPPINTAR secara spesifik mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi lokal. Keduanya menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek sosial, teknologi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh (Yoram et al., 2021) mengevaluasi kualitas informasi pada situs web Pemerintah Kota Singkawang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana situs web tersebut memenuhi standar kualitas informasi yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan mengacu pada 10 indikator kualitas informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa situs web ini telah menyediakan informasi yang cukup relevan dan memenuhi standar minimum Depkominfo. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kelemahan, seperti tautan error, halaman kosong, dan konten yang tidak lengkap, yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan peningkatan teknis dan pembaruan konten untuk memastikan kualitas informasi yang lebih baik dan mendukung implementasi kebijakan e-Government secara efektif.

**Keenam**, penelitian (Destalies et al., 2022) mengevaluasi implementasi e-Government di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo melalui aplikasi M-

Paspor. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kendala teknis, seperti error aplikasi, lambatnya notifikasi kode verifikasi, dan kesulitan memilih lokasi serta kebutuhan paspor, yang mengakibatkan ketidakpuasan pengguna. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis data melalui aplikasi Nvivo 12, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan kebutuhan perbaikan dalam pelayanan berbasis elektronik di instansi tersebut.

**Ketujuh**, penelitian yang dilakukan oleh (Indriastiningsih et al., 2024) berfokus pada pelatihan pembuatan website landing page untuk meningkatkan daya saing Desa Wisata Gentan Bulu. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman teknologi informasi dan kemampuan masyarakat dalam membuat website, yang berdampak pada meningkatnya eksposur desa sebagai destinasi wisata. Meski demikian, penelitian ini juga mencatat tantangan seperti perbedaan tingkat pemahaman peserta dan keterbatasan akses teknologi, yang memerlukan strategi lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

**Kedelapan**, penelitian oleh (Gultom et al., 2024) mengevaluasi implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menggunakan metode Design-Reality Gap. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 52%, yang mengindikasikan risiko kegagalan implementasi e-government jika langkah mitigasi tidak dilakukan. Faktor utama penyebab kegagalan ditemukan pada dimensi staffing and skills, diikuti oleh informasi, teknologi, manajemen dan struktur, proses, serta tujuan, nilai, dan motivasi, menyoroti bahwa tantangan dalam implementasi SAKTI lebih banyak bersifat sosio-teknis daripada teknis semata.

**Kesembilan**, penelitian oleh (Aisyah et al., 2021) mengevaluasi tingkat *usability* website Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS). Dengan melibatkan 96 responden melalui teknik *accidental sampling*, penelitian ini menemukan bahwa skor SUS website adalah 51,87, yang masuk dalam kategori *ok* dengan *grade scale* F dan *acceptability ranges marginal low*. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun website dapat diterima, tingkat penerimaan pengguna masih rendah sehingga memerlukan perbaikan. Penelitian ini juga memberikan enam rekomendasi perbaikan sebagai panduan pengembangan website agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa depan.

**Kesepuluh**, penelitian oleh (Untari et al., 2022) mengevaluasi penerapan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) di Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi NADINE efektif meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam aspek kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu, serta mendukung implementasi e-government untuk pelayanan publik yang optimal baik secara internal maupun eksternal. Hal ini membuktikan peran NADINE dalam mendukung digitalisasi birokrasi di Kementerian ESDM.

**Kesebelas**, penelitian yang dilakukan oleh (Fatmasari et al., 2022) mengevaluasi implementasi e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Muara Enim menggunakan metode Pemingkatan E-Government Indonesia (PeGI). Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di instansi tersebut masuk dalam kategori sangat baik dengan skor rata-rata 3.55. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, termasuk penyusunan kebijakan Tata Kelola TIK, penyelarasan Rencana Induk TIK, serta pelengkapan dokumen terkait sumber daya manusia dan aplikasi TIK untuk mendukung keberlanjutan pengembangan e-government.

**Keduabelas**, penelitian (Alifya et al., 2024) mengevaluasi implementasi Program PANDAWA sebagai inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menggunakan teori George C. Edward III, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi program telah berjalan efektif, sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang sesuai, dan struktur birokrasi memiliki SOP yang jelas, meskipun masih terdapat kekurangan pada sumber daya seperti staf dengan latar belakang IT dan fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan internet. Hasil penelitian merekomendasikan peningkatan kualitas fasilitas dan kapasitas jaringan untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima di wilayah tersebut.

**Ketigabelas**, penelitian oleh (Kusmiarto et al., 2021) mengevaluasi kesiapan transformasi digital layanan pertanahan di Indonesia dengan menggunakan kerangka Digital Governance Readiness Assessment (DGRA) yang disesuaikan untuk sektor pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun indikator seperti kepemimpinan, desain berbasis pengguna, dan manajemen perubahan memperoleh skor cukup tinggi ( $\geq 2.0$ ), masih terdapat kekurangan signifikan pada infrastruktur teknologi (1.7), regulasi (1.4), serta keamanan siber dan ketahanan (1.0). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pada aspek infrastruktur, regulasi, dan pengelolaan data untuk mewujudkan transformasi digital yang andal dalam layanan pertanahan.

**Keempatbelas**, penelitian oleh (Yuli et al., 2023) mengeksplorasi pengelolaan komunikasi digital pemerintah Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pasca-pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metode fenomenologi Edmund Husserl, penelitian ini menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi digital yang melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital yang terarah dan terkoordinasi melalui agenda setting dan framing telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kapasitas digital.

**Kelimabelas**, penelitian oleh (Ahmad et al., 2021) mengkaji penerapan e-government berbasis website di Enrekang, dengan fokus pada kualitas situs web pemerintah daerah dalam hal transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak situs web unit kerja daerah di Enrekang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Diskominfo pada tahun 2017, dengan masalah seperti halaman yang kosong dan informasi yang tidak terbaru. Selain itu, peran media sosial dalam mendukung e-government juga minim, karena tidak ada umpan balik yang diberikan pemerintah terhadap masukan dan pertanyaan dari masyarakat.

**Keenambelas**, penelitian oleh (Mislawaty et al., 2022) membahas inovasi dan reformasi pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan melalui sistem "E-Sumsel", yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa program "E-Sumsel" membantu mentransformasi sistem manajemen publik dan memastikan transparansi layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk masih tingginya pengaruh dominasi vertikal antar instansi pemerintah, yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan strategi inovatif guna meningkatkan harmonisasi dan kualitas manajemen publik di daerah tersebut.

**Ketujuhbelas**, penelitian oleh (Kadarisman et al., 2022) menganalisis kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Industry 4.0 dan Society 5.0, dengan fokus pada manajemen strategis birokrasi dan pemerintahan yang berorientasi kewirausahaan. Menggunakan metode campuran, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data berbasis kebijakan dan kepemilikan data memiliki peran strategis dalam memandu pembuat kebijakan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya manajemen strategis birokrasi dan pemerintahan kewirausahaan, yang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan globalisasi, baik secara parsial maupun simultan.

**Kedelapanbelas**, penelitian oleh (David et al., 2023) mengkaji strategi adopsi teknologi digital di pemerintah lokal dengan menggunakan pendekatan PRISMA, yang mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi melalui kerangka orang, proses, dan teknologi. Temuan utama menunjukkan bahwa dalam aspek orang, strategi mencakup pembangunan platform partisipasi publik, peningkatan keterampilan pegawai, dan pengembangan mindset positif bagi pengambil keputusan. Dalam aspek proses, strategi melibatkan penetapan peran pemain, prosedur yang jelas, regulasi yang tepat, serta masukan pengguna. Sementara dalam aspek teknologi, penting untuk memahami dampak teknologi, kesiapan teknologi, dan kemudahan adopsi. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan pemerintah lokal dalam upaya transformasi digital.

**Kesembilanbelas**, penelitian (Hasanah et al., 2023) mengkaji tren dan isu utama terkait pemerintahan digital di disiplin ilmu sosial, serta mengusulkan model teoretis yang relevan. Dengan menganalisis 115 artikel terkait dari database Scopus menggunakan berbagai alat analisis seperti NVivo 12 Plus dan VOSVier, ditemukan bahwa topik seperti e-government, open government, dan adopsi teknologi terus berkembang. Penelitian ini juga mengidentifikasi fitur utama pemerintahan digital, seperti sistem, pengembangan, layanan, model, informasi, kebijakan, manajemen, dan jaringan, serta menyarankan model teoretis untuk penelitian di masa depan.

**Keduapuluh**, penelitian (Apriliyanti et al., 2021) menganalisis faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan program e-government di negara-negara anggota ASEAN (AMS), dengan fokus pada adopsi dan implementasi di berbagai negara dengan kondisi politik dan ekonomi yang berbeda. Ditemukan bahwa selain infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, faktor seperti institusi, sumber daya, kepemimpinan, dan nilai budaya organisasi memainkan peran penting dalam kesuksesan e-government. Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi e-government, khususnya di negara berkembang.

**Keduapuluhsatu**, penelitian (Adiningtyas & Gunawan, 2021) mengevaluasi efektivitas Program Desa Digital di Jawa Barat, khususnya pada bidang e-commerce melalui program Talesa yang bekerja sama dengan Tokopedia. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam berjualan secara online dengan menyediakan infrastruktur dan pelatihan digital, namun kurangnya pengawasan setelah pelatihan membuat keberlanjutan program tidak terjamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ICT, layanan telekomunikasi, logistik, dan platform e-commerce berpengaruh pada efektivitas program, sementara pengembangan keterampilan tidak memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan program tersebut.

**Keduapuluhdua**, penelitian (Ummah et al., 2022) mengkaji implementasi e-government di Desa Cijantur, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, sebagai

bagian dari program desa digital di Indonesia. Meskipun Indonesia menunjukkan peningkatan peringkat pada Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) pada tahun 2020, kesenjangan digital dan ketimpangan akses internet di daerah masih menjadi tantangan besar. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan implementasi e-government berbasis website di Desa Cijantur disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan website, kurangnya orientasi pada ekonomi digital, serta rendahnya kebutuhan masyarakat akan akses teknologi. Penelitian ini menyarankan peningkatan infrastruktur dan jaringan internet yang lebih baik untuk mendukung kemajuan teknologi di desa.

**Keduapuluhtiga**, penelitian (Murtinah, et al., 2023) mengkaji peran kolaborasi pemerintah, masyarakat desa, dan sektor swasta dalam pengembangan desa digital di Karanganyar, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik telah meningkatkan kapasitas perangkat keras dan sistem aplikasi, serta memperbaiki layanan informasi yang berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemberian ruang bagi kreativitas serta inovasi pejabat desa untuk mempercepat digitalisasi layanan dan potensi desa.

**Keduapuluhempat**, penelitian (Ilham et al., 2022) mengeksplorasi penerapan konsep Pertanian 4.0 dalam program Desa Cerdas, dengan fokus pada kontribusinya terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi Pertanian 4.0 sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan input dan air, serta memberikan kemampuan prediksi yang menguntungkan bagi petani. Dengan mengadopsi Pertanian 4.0, desa cerdas dapat memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, implementasi teknologi ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa berbasis pertanian yang berkelanjutan.

**Keduapuluhlima**, penelitian (Valverde et al., 2023) membahas konsep pengelolaan dan evaluasi pengembangan desa digital yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan. Penulis mengusulkan sebuah model pengelolaan desa digital

yang dikembangkan berdasarkan tujuan, hasil yang diharapkan, dan masalah yang ada dalam implementasi desa digital sebelumnya. Evaluasi keberlanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam manajemen sumber daya manusia dan rantai pasokan. Model pengembangan dan metode evaluasi yang diajukan bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam pembangunan dan evaluasi desa digital.

## 2.2 Kerangka Teori

Dalam menganalisis kinerja pengembangan investasi daerah di Kabupaten Magetan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori daya tarik investasi yang dikembangkan oleh Michael Porter melalui konsep *Porter's Diamond Model* (1990). Model ini menyatakan bahwa daya saing dan daya tarik suatu wilayah untuk investasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya alam atau biaya tenaga kerja yang murah, tetapi oleh kombinasi dari empat determinan utama yang saling berkaitan dan memperkuat. Keempat determinan tersebut adalah: faktor kondisi (*factor conditions*), kondisi permintaan (*demand conditions*), industri terkait dan pendukung (*related and supporting industries*), serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*). Teori ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi seberapa siap dan menarik suatu daerah dalam mendukung pertumbuhan investasi secara berkelanjutan.

*Factor conditions* mencakup kondisi infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, dan sumber daya alam lokal yang dapat mendukung kegiatan investasi. *Demand conditions* merujuk pada keberadaan pasar lokal dan regional yang memberikan sinyal kebutuhan terhadap produk atau jasa tertentu, yang pada gilirannya mendorong minat investor. *Related and supporting industries* mengkaji sejauh mana kehadiran industri pendukung atau klaster industri yang terintegrasi di daerah tersebut. Sementara itu, *firm strategy, structure, and rivalry* melibatkan aspek kebijakan regulasi, iklim persaingan usaha, serta strategi pembangunan ekonomi lokal yang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan inovatif. Melalui penerapan keempat dimensi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh implementasi kebijakan pengembangan investasi

di Kabupaten Magetan, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta menggali potensi yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan daya tarik investasi daerah di masa mendatang.

Teori daya tarik investasi yang dikemukakan oleh Michael Porter melalui konsep *Porter's Diamond Model* menjadi salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam memahami daya saing wilayah dan kemampuannya menarik investasi. Model ini menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya alam atau tenaga kerja murah, tetapi juga oleh sinergi dari empat komponen utama: faktor kondisi (*factor conditions*), kondisi permintaan (*demand conditions*), industri terkait dan pendukung (*related and supporting industries*), serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*). Keempat elemen ini menciptakan sistem dinamis yang dapat memperkuat posisi suatu wilayah sebagai lokasi investasi yang menarik dan kompetitif.

Dalam konteks Kabupaten Magetan, *factor conditions* mencerminkan ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet), kualitas tenaga kerja, serta potensi sumber daya lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga. Sementara itu, *demand conditions* menyoroti seberapa kuat dan berkembangnya pasar lokal yang mampu menciptakan permintaan berkelanjutan atas barang dan jasa, yang sangat menentukan minat investor. Selain itu, keberadaan industri pendukung atau *supporting industries* seperti UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan lokal turut memperkuat ekosistem investasi yang sehat. Adapun aspek terakhir, yaitu strategi dan struktur usaha serta persaingan, berhubungan erat dengan peran pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang mendukung serta mendorong pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi dalam menghadapi persaingan.

Dengan menggunakan pendekatan *Porter's Diamond Model*, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana kebijakan dan inisiatif pengembangan investasi di Magetan sudah selaras atau belum dengan keempat komponen tersebut. Teori ini menjadi penting karena memberikan panduan untuk menilai tidak hanya kondisi objektif di lapangan, tetapi juga bagaimana hubungan

antar elemen tersebut membentuk ekosistem yang kondusif atau sebaliknya menghambat investasi. Evaluasi ini juga berguna untuk mengidentifikasi peluang penguatan kebijakan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur, kolaborasi industri, maupun penguatan peran pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.

